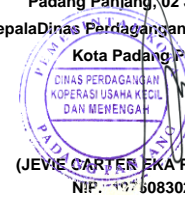


RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE-				NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE-				NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE-				NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KE-				KET
			1	2	3	4				1	2	3	4				1	2	3	4				1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)				(1)	(2)	(3)	(4)				(1)	(2)	(3)	(4)				(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	0%	0%	0%	25%	1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	0%	0%	0%	10%	1	Pengendalian Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan Pengawasan distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ditingkat daerah Kab/Kota	Pengendalian Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan Pengawasan distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya ditingkat daerah Kab/Kota	1	1	0	0	1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhaap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pembinaan Pemantauan dan Pengawasan Barang beredar dan berbahaya distribusi bahan berbahaya serta tersedianya informasi harga	1	1	0	0	
													2	Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat,pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinan usahanya	25	25	25	25	2	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat,pusat perbelanjaan dan toko	jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan perizinan yang dilaksanakan	25	25	25	25		
							2	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok				9%	3	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting lainnya		100		150	3	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota	1. Jumlah monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaksanakan 2. Jumlah pengawasan ketersediaan stock kebutuhan pokok dan penting lainnya		1	1	1	
							3	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah				100%	4	Pelaksanaan metrologi legal berupa,tera,tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Prasarana yang diadakan, Jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang	0	0	0	####	4	Pelaksanaan metrologi legal,berupa tera,Tera Ulang	Jumlah Prasarana yang diadakan, Jumlah UTTP yang di tera dan tera ulang			500	500	
							4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya				5%	5	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Ddalam Negeri	Jumlah Produk IKM yang dipromosikan	10	10	10		5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Dekranasda yang Difasilitasi	2	1			
																				6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/ Kota	Jumlah IKM yang difasilitasi desain kemasan produk		40	40	40		

2	Meningkatnya produktivitas sektor Industri	Persentase Peningkatan Asset dan Omset IKM				7%	5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP.SNI dan Merk)				33%	6	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop,pendampingan maupun pembinaan lainnya				242	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop,pendampingan maupun pembinaan lainnya				1	
																					8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah unit pengelolaan penyamakan kulit yang dikelola					1
							6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian				###	7	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang diterbitkan rekomendasi IUI, izin perluasan Usaha Industri (IPUI),Izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)				30	9	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis				6	
3	Meningkatnya Koperasi aktif berpola syariah	Persentase Peningkatan Asset dan Omset Koperasi berpola Syariah				78%	7	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang di lakukan pengawasan				35%	8	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah				33	10	Pengawasan kekuatan,kesehatan,kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kperasi yang telah dilakukan pengawasan				25	
							8	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berpola syariah				76%	9	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah hasil RAT yang setuju dengan pola syariah				33	11	Pemberdayaan peningkatan produktivitas,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,penguatan kelembagaan,penataan manajemen,standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi legalitas koperasi syariah				10	

Padang Panjang, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Padang Panjang



(JEVIE CARTER EKA PUTRA, ST.MT)
NIP. 508302003121002